



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA TERNATE
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA MOROTAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RIANA EKAWATI**
2. Jabatan : **KETUA**
3. NHK : **108300**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.750.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/64 m2 di KOTA TERNATE ,
HASIL SENDIRI Rp. 502.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di SUKOHARJO, HASIL
SENDIRI Rp. 552.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp.
82.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/15 m2 di HALMAHERA
UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 6 m2/23 m2 di SUKOHARJO, HASIL
SENDIRI Rp. 35.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/21 m2 di SUKOHARJO, HASIL
SENDIRI Rp. 552.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 74.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA V-IXION SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 17.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL
SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 16.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 15.000.000
5. MOTOR, HONDA E1F02N12M2AT Tahun 2017, HASIL SENDIRI



	Rp. 19.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	14.400.000
D. SURAT BERHARGA		Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp.	22.400.000
F. HARTA LAINNYA		Rp.	75.000.000
Sub Total		Rp.	1.935.800.000
III. HUTANG		Rp.	463.196.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	1.472.604.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.